Fiscal Buffering dan Penimbunan Stok Akhir Tahun di Satuan Kerja Kabupaten Pati dan Rembang Tahun 2023-2025

Ilone Salsabila[1], Armansyah Vendy Pradana [2,] Fabio Bolanda Sandy[3]
[1]Universitas Terbuka - *[1]ilonesalsa25@gmail.com*
Layanan Perbendaharaan Negara - *[2]Armansyah.vendy@kemenkeu.go.id*
Universitas TIDAR - *[3]fabio@untidar.ac.id*

Abstrak *-The tendency to concentrate expenditures at the end of the fiscal year remains a classic phenomenon in public financial management at the work unit level. This study examines the practice of fiscal buffering within work units in Pati and Rembang Regencies through the observation of inventory stockpiling toward the close of the fiscal year. Grounded in the concept of budgetary slack and the implications of the "spend-it-or-lose-it" principle, this behavior is viewed as a defensive managerial strategy to safeguard budget allocations and achieve Budget Execution Performance Indicator (IKPA) targets. Employing a quantitative approach, this research analyzes the effect of goods expenditure balances reported in the Budget Realization Report (LRA) on inventory asset balances in the Fourth Quarter Balance Sheet for the 2023–2025 period. The data were processed using simple linear regression following a transformation via Blom's Formula to satisfy the normality assumption. The empirical findings reveal that goods expenditures in the LRA have a positive and statistically significant effect on inventory balances in the Balance Sheet, with a regression coefficient of 0.223. These results indicate that year-end budget absorption acceleration is driven primarily by administrative pressures to exhaust remaining funds rather than by actual operational requirements. Consequently, budget managers are advised to establish priority-based procurement planning from the beginning of the year, while regulators should redesign the IKPA evaluation framework to encourage more balanced and effective budget absorption throughout the fiscal year.*

Keywords: Fiscal Buffering, Budget Realization Report, Balance Sheet, Inventory, Work Unit.

1. PENDAHULUAN

Efektivitas pelaksanaan anggaran negara merupakan pilar utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara bijaksana, tetapi juga menjadi indikator kualitas tata kelola fiskal secara keseluruhan. Pengelolaan anggaran yang efektif diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Regulasi ini menetapkan standar pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual, di mana diatur secara rinci bagaimana aset lancar khususnya persediaan harus disajikan dalam neraca termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna memastikan kewajaran dan transparansi laporan keuangan instansi.

Fenomena perilaku *fiscal buffering* menjadi salah satu isu krusial yang sering muncul dalam praktik pengelolaan anggaran. Perilaku ini merujuk pada upaya unit kerja untuk menciptakan cadangan atau "*buffer*" sumber daya guna mengantisipasi ketidakpastian di masa depan, sekaligus sebagai pengamanan posisi anggaran. Dalam konteks ini, *fiscal buffering* sering kali tercermin dari lonjakan saldo persediaan di akhir tahun anggaran, di mana unit kerja cenderung melakukan pengadaan barang secara masif pada periode akhir untuk menghindari potensi pemotongan anggaran pada tahun berikutnya. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis pergudangan atau manajemen persediaan, melainkan mencerminkan inefisiensi sistemik dalam pelaksanaan anggaran, di mana sisa anggaran dihabiskan secara terburu-buru (*rush spending*) demi menjaga alokasi di masa mendatang.

Penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum mencapai tingkat optimal, serta berisiko menyebabkan kerugian bagi negara dari segi ekonomi seperti pemborosan, penurunan kualitas pengadaan, dan distorsi prioritas belanja. Pengelolaan fiskal yang efektif dalam sektor publik menuntut keselarasan yang ketat antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja demi mencapai efisiensi organisasi serta pencapaian

tujuan pembangunan. Jika fenomena *fiscal buffering* ini dibiarkan berlangsung tanpa pemahaman mendalam terhadap motif dan dampaknya, maka upaya reformasi birokrasi serta optimalisasi anggaran negara akan sulit tercapai (Mulyani, 2021).

Penelitian ini mengidentifikasi adanya diskoneksi antara pencapaian target serapan anggaran secara administratif dengan efisiensi pengelolaan aset fisik. Data pola penyerapan anggaran secara konsisten menunjukkan fenomena *fiscal buffering*, di mana realisasi belanja barang menumpuk 30–50% di Triwulan IV, dengan puncak pada bulan Desember. Fenomena ini terdeteksi melalui lonjakan saldo persediaan di neraca posisi 31 Desember yang tidak proporsional terhadap rata-rata konsumsi bulanan Satker. Faktor utamanya meliputi perencanaan anggaran dan implementasi belanja; banyak Satker melakukan pengadaan besar-besaran (alat tulis kantor, bahan pemeliharaan, dan lain-lain) di akhir tahun hanya untuk "menyelamatkan" sisa anggaran agar tidak kembali ke Kas Negara, sehingga memicu penumpukan "*buffering*" stok gudang yang melebihi kebutuhan operasional (Silalahi & Aba, 2025).

Fenomena ini juga terkait langsung dengan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga (yang masih menjadi acuan utama hingga TA 2025–2026, dengan penyesuaian kontekstual akibat efisiensi belanja Inpres Nomor 1 Tahun 2025). IKPA menilai penyerapan yang merata, deviasi antara perencanaan dan realitas, capaian output (dengan bobot tertinggi 25%), serta pengendalian *rush spending* dan penumpukan akhir periode. Kerangka kerja ini secara eksplisit menekan *fiscal buffering* mikro yang berpotensi merusak kewajaran laporan keuangan sesuai dengan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta regulasi BMN/persediaan terkait.

Tinjauan literatur mengungkap adanya *research gap* yang signifikan. Teori penganggaran publik (Menifield, 2020) memandang anggaran sebagai instrumen linier yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi, namun data empiris menunjukkan pola non-linier berupa lonjakan belanja di akhir tahun. Dalam buku *Manajemen Perbendaharaan Negara*, Slamet & Sukoasih (2023) menekankan pentingnya sinkronisasi manajemen perbendaharaan, sementara fenomena penimbunan barang justru mencerminkan adanya distorsi alokasi sumber daya. Lebih lanjut, Tri Setyo Mulyani (2021) menyoroti kekosongan bukti kuantitatif mengenai apakah akumulasi persediaan berfungsi sebagai kompensasi *budget gap*. Di sisi lain, literatur internasional (Xi & Che, 2025) memposisikan *fiscal buffering* sebagai mekanisme makro untuk stabilisasi fiskal, namun dalam konteks Satker di Indonesia, fenomena ini diduga bergeser menjadi strategi mikro manajerial yang bersifat manipulatif. Karena penelitian sebelumnya masih terbatas pada analisis deskriptif umum, maka diperlukan pengujian kuantitatif yang presisi untuk membuktikan hubungan kausal antara sisa anggaran dan peningkatan saldo persediaan yang tidak sesuai dengan realita lapangan.

Relevansi penelitian ini terletak pada pembuktian objektif terhadap fenomena "rahasia umum" di Satker, khususnya wilayah Pati dan Rembang, Jawa Tengah, yaitu apakah anggaran bertransformasi menjadi manfaat publik atau sekadar tumpukan aset gudang demi tercapainya target serapan. Manajemen keuangan publik yang baik mensyaratkan setiap alokasi belanja untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata (Slamet & Sukoasih, 2023), sementara terjadinya lonjakan anggaran yang tidak strategis menjadi indikator kegagalan dalam mewujudkan prinsip penganggaran yang kredibel (Menifield, 2020). Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan dalam mendesain ulang sistem insentif/sanksi untuk birokrasi yang lebih berorientasi hasil (*output/outcome-oriented*).

Berdasarkan kesenjangan teori empiris tersebut dan realitas di lapangan, fokus utama penelitian ini diarahkan pada fenomena peningkatan belanja persediaan pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini merumuskan masalah utama: apakah lonjakan belanja persediaan tersebut benar-benar mencerminkan pemenuhan output riil atau justru merupakan strategi manajerial untuk mengamankan sisa anggaran agar tidak hangus serta menghindari penurunan atau penghapusan pagu anggaran pada tahun berikutnya. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menguji pengaruh variabel realisasi belanja barang (52) pada LRA terhadap keputusan pengadaan persediaan akhir tahun di Neraca. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban berbasis data empiris sebagai landasan perbaikan kebijakan pengelolaan anggaran pada Satker, khususnya di wilayah Pati dan Rembang, agar penggunaan belanja persediaan semakin

berorientasi pada kualitas output serta memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.

Dalam perspektif perbendaharaan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fase implementasi kebijakan fiskal yang krusial guna memastikan distribusi anggaran publik dilakukan secara tepat guna, berdaya guna, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Satuan kerja (satker) sebagai unit pelaksana teknis APBN berperan dalam mengelola dan merealisasikan anggaran melalui pengalokasian sumber daya, kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran, serta penciptaan nilai manfaat (*value for money*) yang tercermin antara lain melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Fiscal Buffering merujuk pada strategi pengelolaan keuangan publik yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk membentuk cadangan atau *buffer* fiskal guna menghadapi ketidakpastian anggaran, volatilitas pendapatan, atau guncangan ekonomi di masa mendatang. Dalam konteks perbendaharaan negara, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen penstabilan fiskal yang memungkinkan satuan kerja mempertahankan kontinuitas operasional tanpa terganggu oleh fluktuasi alokasi dana, sekaligus fleksibilitas keuangan jangka pendek.

Dalam literatur keuangan publik, *fiscal buffering* dipahami sebagai mekanisme pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh entitas publik untuk menciptakan cadangan sumber daya guna menghadapi ketidakpastian dan menjaga keberlanjutan pelaksanaan kegiatan. Mardiasmo (2018) dalam *Akuntansi Sektor Publik* menjelaskan bahwa keterbatasan fleksibilitas anggaran dalam sistem penganggaran tahunan mendorong pengelola anggaran melakukan penyesuaian waktu dan komposisi belanja sebagai bentuk respons manajerial terhadap risiko ketidakpastian kebutuhan di masa mendatang.

Pada tingkat satuan kerja (satker) sebagai unit pelaksana teknis anggaran, *Fiscal Buffering* termanifestasi dalam upaya mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran, antara lain melalui percepatan realisasi belanja dan akumulasi persediaan. Praktik tersebut secara teoritis dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga kesinambungan operasional satker pada periode berikutnya, sekaligus mencerminkan respons terhadap tekanan target penyerapan dan keterbatasan ruang penyesuaian anggaran dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang maupun bahan baku bersifat lancar yang dimiliki oleh satuan kerja (satker) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, seperti alat tulis kantor, bahan bakar, suku cadang, bahan habis pakai, bahan kimia, serta barang lainnya yang bersifat konsumtif dan tidak dipergunakan lebih dari satu tahun anggaran. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 05 mengenai Akuntansi Persediaan, persediaan meliputi berbagai barang maupun perlengkapan yang didapatkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok serta fungsi instansi pemerintah, baik yang akan digunakan langsung maupun diserahkan kepada masyarakat. PSAP mengatur bahwa persediaan diakui pada saat diperoleh atau dikuasai oleh entitas pemerintah dan dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan pengeluaran persediaan akibat pemakaian dicatat sebagai beban pada periode terjadinya konsumsi. Dalam struktur neraca sendiri, posisi persediaan dicatatkan sebagai komponen dari aset lancar. Dalam konteks implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengadaan persediaan oleh satuan kerja (satker) pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang rasional dan terukur. Namun, pada praktiknya, pembelian persediaan yang dilakukan secara intensif menjelang akhir tahun anggaran dapat mengakibatkan penumpukan stok yang melampaui kebutuhan aktual. Fenomena tersebut, dalam perspektif perbendaharaan negara, dapat dipahami sebagai manifestasi *Fiscal Buffering* di tingkat satker, yaitu upaya pengelola anggaran menjaga ketersediaan sumber daya untuk periode berikutnya melalui akumulasi persediaan. Meskipun perlakuan akuntansi persediaan tersebut secara formal masih sesuai dengan ketentuan PSAP, penimbunan stok yang berlebihan berpotensi menimbulkan inefisiensi alokasi anggaran dan melemahkan pencapaian prinsip *value for money* dalam tata kelola keuangan negara.

Secara teoretis, anggaran publik dipandang sebagai instrumen linear yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi secara terukur (Menifield, 2020). Namun, dalam praktik pengelolaan keuangan negara, dinamika penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering kali diwarnai oleh fenomena perilaku manajerial yang defensif, salah satunya dikenal sebagai *fiscal buffering* (Mardiasmo, 2018; Slamet & Sukoasih, 2023). Fenomena ini termanifestasi melalui dorongan psikologis dan administratif *spend-it-or-lose-it*, di mana satuan kerja (satker) berupaya keras menghabiskan sisa pagu anggaran di akhir tahun agar tidak hangus atau dikembalikan ke Kas

Negara, serta untuk mengamankan alokasi anggaran pada periode tahun berikutnya (Liebman & Mahoney, 2017; Yalisman & Khoirunurrofik, 2025).

Dalam konteks operasional satuan kerja, dorongan untuk mengamankan penyerapan anggaran secara masif menjelang akhir tahun anggaran (terutama pada Triwulan IV) sering kali direalisasikan melalui pengadaan barang habis pakai secara intensif. Pengadaan ini pada akhirnya memicu lonjakan volume pengadaan yang tidak proporsional terhadap tingkat konsumsi normal, sehingga tercermin langsung pada peningkatan saldo persediaan di dalam Neraca (Mulyani, 2021). Meskipun secara formal perlakuan akuntansi atas pengadaan tersebut telah patuh terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, secara substansial penumpukan stok tersebut mencerminkan adanya distorsi alokasi sumber daya dan inefisiensi pengelolaan aset lancar (Silalahi & Aba, 2025).

Lebih lanjut, kebijakan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 secara normatif menuntut penyerapan yang merata dan terkendali. Namun, target kuantitatif penyerapan belanja barang di Triwulan IV sering kali dimanfaatkan oleh satuan kerja sebagai celah strategis (*strategic behavior*) untuk mendongkrak capaian kinerja penyerapan secara administratif. Kondisi ini menciptakan hubungan kausalitas yang kuat bahwa peningkatan realisasi belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbanding lurus dengan akumulasi saldo persediaan di Neraca akhir tahun. Berdasarkan kerangka konseptual, tinjauan literatur, dan fenomena empiris perbendaharaan negara tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1: Realisasi belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap saldo persediaan pada Neraca Triwulan IV Satuan Kerja di wilayah Pati dan Rembang.

2. METODE

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kuantitaif dengan titik berat analisis pada penggunaan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah. Objek penelitian ini mencakup data *time series* LRA dan Neraca Triwulan IV Satker wilayah Pati dan Rembang tahun 2023 s.d. 2025. Secara teoretis, desain dalam penelitian ini berpijak pada prinsip dasar penganggaran sektor publik (Menifield, 2020) dan mekanisme manajemen perbendaharaan negara yang menuntut akuntabilitas dalam setiap siklus belanja (Slamet & Sukoasih, 2023). Integritas kedua data ini sangat krusial untuk memotret bagaimana realisasi uang keluar (*cash outflow*) bertransformasi menjadi akumulasi aset lancar di akhir periode akuntansi.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Tahapan pertama dilakukan dengan cara menguji pengaruh menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana. Dalam tahap ini, data ditransformasikan menggunakan *Blom's Formula* guna memenuhi asumsi normalitas sehingga model yang dihasilkan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) untuk menjelaskan variabel penentu dalam kesenjangan anggaran (Blom, 1958), serta potensi timbulnya *budgetary slack* (Fauzan, n.d.). Dengan adanya hal ini langkah yang diambil bertujuan untuk menguji sejauh mana variabel realisasi belanja yang berperan sebagai determinan utama dalam pembentukan instrumen *Fiscal Buffering* (Ghozali, 2018).

Model regresi yang digunakan dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :
Y : Saldo Persediaan Neraca
a : Konstanta
b : Koefesien Regresi
X : Saldo LRA
e : *Error term* (Variabel Penganggu)

Kemudian untuk menghasilkan model regresi yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), maka dilakukan serangkaian uji asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Dalam tahapan ini ditempuh guna memvalidasi bahwa model regresi yang diaplikasikan tidak memiliki bias dan memenuhi syarat – syarat ekonometrika. Rangkaian pengujian asumsi klasik

dalam studi ini mencakup Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Linearitas.

Selanjutnya, data dianalisis melalui pengujian hipotesis menggunakan uji t yang diaplikasikan guna mengevaluasi signifikansi konstribusi variabel independen secara parsial dalam mendeskripsikan fluktuasi yang terjadi pada variabel dependen. Mengetahui landasan teori *Fiscal Buffering* yang menunjukkan arah hubungan yang spesifik (positif), maka studi ini menerapkan metode Uji Dua Sisi (*Two-Tailed Test*) sebagaimana dijelaskan Ghozali (2018), dengan tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan sebesar 0,05 yang didistribusikan ke dua ujung kurva masing – masing sebesar 0,025. Penentuan nilai kritis distribusi t didasarkan pada derajat bebas (df) melalui formulasi $n-2$, dimana n mempresentasikan total sampel yang digunakan untuk observasi. Selanjutnya penentuan keputusan statistik yang dilakukan dengan megomparasikan nilai t_{hitung} terhadap t_{tabel} serta meninjau perolehan nilai signifikansi yang telah dihitung melalui perangkat lunak pengolahan data SPSS versi 26.0 (Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

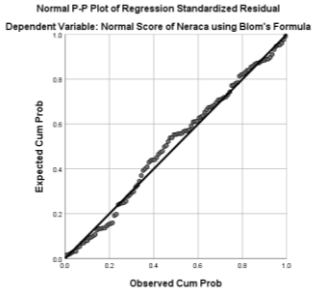
Hasil Olah Data

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data observasi sebanyak 115 sampel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Triwulan IV di satuan kerja wilayah Pati dan Rembang tahun 2023–2025. Variabel independen yang dianalisis mencakup akun belanja barang pada LRA, sedangkan variabel dependen direpresentasikan oleh akun persediaan pada Neraca. Sebelum model regresi diestimasi lebih lanjut, pengujian model terlebih dahulu melalui serangkaian uji asumsi klasik.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* (Gambar 1) menunjukkan bahwa sebaran titik data terkonsentrasi secara ketat di sekitar garis diagonal serta mengikuti orientasi garis tersebut. Asumsi normalitas ini diperkuat melalui penerapan *Blom's Formula* pada variabel dependen (Neraca) untuk memastikan presisi distribusi data. Berdasarkan kriteria statistik tersebut, nilai *residual* dalam model penelitian ini terkonfirmasi terdistribusi secara normal dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahapan analisis regresi berikutnya.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas
P-P Plot of Regression Standardized Residual

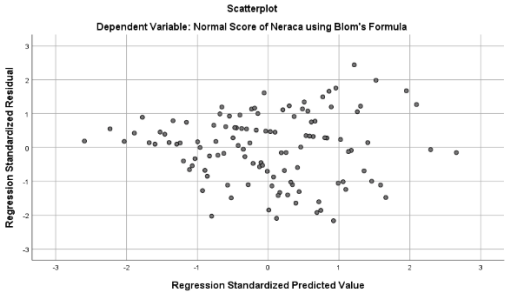


Sumber: data diolah, 2026

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ketidaksamaan varians *residual* antar-pengamatan dalam model regresi. Berdasarkan hasil analisis *scatterplot* pada Gambar 2, sebaran titik data terlihat acak serta tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu seperti gelombang, penyempitan, atau pelebaran. Kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa model regresi terbebas dari gangguan heteroskedastisitas, sehingga memiliki reliabilitas yang valid untuk memprediksi pengaruh saldo Belanja Barang pada LRA terhadap saldo Persediaan di Neraca.

Gambar 2 Hasil Uji **Heteroskedastisitas**



Sumber: data diolah, 2026

Uji Autokorelasi

Tabel 1 Uji Autokorelasi : Durbin Watson

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.230[a]	.053	.044	.9229138	1.306

a. **Predictors: (Constant), Normal Score of LRA using Blom's Formula**

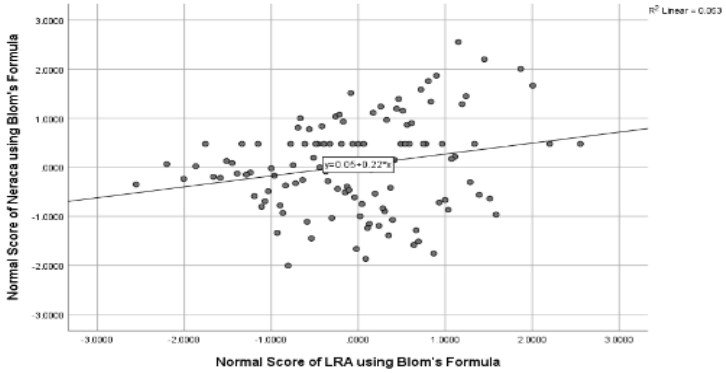
b. Dependent Variable : Normal Score of Neraca using Blom's Formula

Pengujian autokorelasi menggunakan statistik *Durbin-Watson* menghasilkan nilai sebesar 1,306 (Tabel 1). Meskipun secara statistik nilai tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan autokorelasi positif ringan, kondisi yang umum dijumpai pada data *pooled/panel* antar periode penggunaan *Blom's Formula* pada variabel LRA dan Neraca secara efektif membantu menstabilkan varians *residual*. Dengan demikian, model regresi tetap konsisten dan andal untuk menguji pengaruh Laporan Realisasi Anggaran terhadap Neraca dalam analisis kausalitas ini.

Uji Linearitas

Uji linearitas dievaluasi melalui sebaran data pada *Normal Score Scatterplot* yang ditransformasikan menggunakan *Blom's Formula*. Berdasarkan visualisasi pada Gambar 3, titik-titik observasi tersebar secara konsisten di sekitar garis regresi linier tanpa menunjukkan pola kurva atau non-linearitas. Hubungan tersebut diperkuat oleh koefisien determinasi (R^2) sebesar ,053 dengan arah kemiringan garis yang positif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa model regresi linier sederhana yang digunakan telah valid dan akurat untuk memprediksi fenomena *Fiscal Buffering* pada satuan kerja di wilayah Pati dan Rembang.

Gambar 3 Hasil Uji Linearitas



Sumber: Data, diolah 2026

Hasil Regresi Linear Sederhana

Tabel 2 Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.047	.086		.545	.587
	Normal Score of LRA using Blom's Formula	.223	.089	.230	2.508	.014

a. Dependent Variable: Normal Score of Neraca using Blom's Formula

Sumber: Data, diolah 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linear sederhana, diperoleh persamaan model untuk fenomena *Fiscal Buffering* di wilayah Pati dan Rembang sebagai berikut:

$$Y = 0.047 + 0.223X$$

Interpretasi persamaan tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 0.047, yang merepresentasikan tingkat dasar saldo persediaan ketika realisasi belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bernilai konstan atau nol. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0.223 menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya, setiap penambahan satu satuan skor normal pada saldo belanja barang di LRA akan memicu peningkatan saldo persediaan di Neraca sebesar 0.223 satuan.

Validitas model ini diperkuat oleh hasil uji linearitas melalui pengamatan kurva *scatterplot* (Gambar 3). Titik-titik observasi terlihat tersebar secara konsisten mengikuti arah garis regresi. Meskipun terdapat penyesuaian skala akibat transformasi *Blom's Formula*, kedua instrumen menunjukkan konsistensi hasil yang searah. Temuan ini membuktikan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi, di mana hubungan antara penyerapan anggaran dan penumpukan stok persediaan di akhir tahun terbukti linear dan signifikan secara statistik dengan nilai signifikansi p = 0.014 (lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0.05).

Uji T

Setelah model regresi terbentuk, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji t untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.508. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi (α= 0,05/2 = 0,025) dan derajat kebebasan (df = n - 2) sebesar 113, yang menghasilkan *Degree of Freedom* (df) bernilai 1,981.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.508 > 1.981) dengan nilai signifikansi p = 0.014 < 0.05. Dengan demikian, hipotesis penelitian H_1 diterima. Temuan ini mengonfirmasi bahwa realisasi belanja barang pada LRA berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap fluktuasi saldo persediaan pada Neraca satuan kerja di wilayah Pati dan Rembang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terbukti secara empiris bahwa saldo belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap saldo persediaan pada Neraca Triwulan IV. Temuan ini memberikan konfirmasi kuantitatif yang kuat mengenai keberadaan fenomena *fiscal buffering* di tingkat satuan kerja (satker) wilayah Kabupaten Pati dan Rembang. Secara teoretis, hubungan positif ini menjelaskan bahwa setiap akselerasi penyerapan anggaran di penghujung tahun tidak bergerak linier dengan penciptaan manfaat ekonomi riil, melainkan berbanding lurus dengan akumulasi nilai aset lancar di neraca. Kondisi ini membuktikan bahwa satker mengandalkan strategi pembentukan "bantalan fiskal" (*buffer*) melalui penimbunan stok barang sebagai instrumen manajerial defensif dalam merespons tekanan tahun anggaran yang kaku (Mardiasmo, 2018; Menifield, 2020).

Secara psikososial dan manajerial, fenomena ini sangat erat kaitannya dengan kultur birokrasi anggaran yang diatur oleh prinsip *spend-it-or-lose-it* (Liebman & Mahoney, 2017; Yalisman &

Khoirunurrofik, 2025). Dalam sistem penganggaran tahunan berbasis kas yang ketat, sisa pagu yang tidak terserap pada akhir tahun akan hangus dan dikembalikan ke Kas Negara, yang secara otomatis memicu kekhawatiran birokratis berupa risiko pemotongan pagu alokasi pada tahun anggaran berikutnya. Tekanan struktural ini mendistorsi rasionalitas ekonomi organisasi, mendorong terjadinya lonjakan belanja secara terburu-buru (*rush spending*) pada Triwulan IV, dan menghasilkan penumpukan persediaan (seperti alat tulis kantor, bahan pemeliharaan, dan barang konsumtif lainnya) di gudang yang jauh melampaui tingkat konsumsi normal. Perilaku oportunistik ini sejalan dengan teori akuntansi sektor publik yang memandang pengelola anggaran sebagai *budget-maximizer* yang merespons insentif administratif ketimbang efisiensi fungsional (Bastian, 2019; Slamet & Sukoasih, 2023).

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memberikan evaluasi kritis yang mendalam terhadap efektivitas instrumen pengendalian kinerja fiskal modern, yakni Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Secara normatif, IKPA dirancang sebagai instrumen strategis untuk meratakan distribusi penyerapan belanja sepanjang triwulan serta mengendalikan penumpukan di akhir periode. Namun demikian, hasil empiris studi ini mengindikasikan adanya paradoks implementasi: target kuantitatif penyerapan belanja barang Triwulan IV (minimal 90%) justru kerap dieksploitasi oleh satker sebagai celah strategis (*strategic gaming*). Satker cenderung menahan atau merealisasikan belanja non-persediaan di triwulan-triwulan awal, sementara pengadaan barang penghasil persediaan terkonsentrasi secara masif di Triwulan IV semata-mata demi mendongkrak skor IKPA administratif.

Pola segregasi belanja tersebut mengonfirmasi bahwa evaluasi kinerja yang terlalu bertumpu pada aspek penyerapan kuantitatif (*budget absorption*) tanpa diimbangi oleh metrik kualitas output riil dan manajemen rantai pasok (*inventory turnover*) berisiko melanggengkan inefisiensi sistemik. Meskipun pencatatan akuntansi persediaan di tingkat satker telah mematuhi standar formal pelaporan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam PSAP Nomor 05 dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022, akumulasi aset lancar yang tidak didasarkan pada kebutuhan operasional yang terukur tetap mencederai prinsip efisiensi dan penciptaan nilai manfaat (*value for money*) dalam tata kelola keuangan negara (Mulyani, 2021; Silalahi & Aba, 2025). Oleh karena itu, temuan ini menegaskan urgensi reformasi kebijakan perbendaharaan bukan sekadar memperbaiki angka serapan di atas kertas, tetapi merombak arsitektur insentif birokrasi agar berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana terhadap data observasi satuan kerja di wilayah Kabupaten Pati dan Rembang tahun 2023–2025, realisasi belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap saldo persediaan pada Neraca Triwulan. Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat mengenai eksistensi fenomena *fiscal buffering* di tingkat mikro perbendaharaan negara. Praktik penimbunan persediaan di penghujung tahun anggaran mencerminkan respons manajerial defensif akibat tekanan psikososial anggaran berprinsip *spend-it-or-lose-it*, di mana satuan kerja melakukan pengadaan barang secara masif (*rush spending*) bukan atas dasar kebutuhan operasional riil, melainkan sebagai strategi administratif untuk mengamankan sisa pagu anggaran agar tidak hangus dan dikembalikan ke Kas Negara. Meskipun pencatatan akuntansi persediaan secara formal telah patuh terhadap PSAP Nomor 05 dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022, akumulasi aset lancar yang berlebihan di akhir periode mencerminkan inefisiensi alokasi sumber daya publik serta melemahkan prinsip penciptaan nilai manfaat (*value for money*), di mana target kuantitatif Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan PER-5/PB/2024 masih menyisakan celah strategis (*strategic gaming*) bagi satuan kerja di Triwulan IV.

Sebagai langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola ke depan, disarankan agar Kementerian Keuangan catus Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penyempurnaan formula penilaian IKPA dengan mengintegrasikan indikator kualitas belanja berbasis *outcome* seperti rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*) dan pengendalian penumpukan stok akhir periode guna menekan praktik *rush spending*. Di sisi lain, para pengelola keuangan di tingkat satuan kerja perlu memperkuat disiplin manajerial melalui penyusunan rencana kebutuhan barang secara presisi berbasis kalender kegiatan sejak awal tahun anggaran (Triwulan I–III) agar pengadaan terdistribusi secara proporsional. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, cakupan wilayah pengamatan disarankan untuk diperluas ke tingkat nasional dengan menggunakan analisis data panel serta menambahkan

variabel kontrol seperti ukuran satuan kerja guna mendalami faktor penjelas *fiscal buffering* secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aminatuzzuria, M., Rahmawati, S., Anam, R., & Djasuli, M. (2025). Analisis keterkaitan antara dana cadangan dan aset publik terhadap *good governance*. *Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)*, 14(2), 728–738. https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.2990

Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2016). Public sector budgeting: A European review. *Journal of Accounting and Public Policy*, 35(5), 495–514. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.001

Bachtiar, U. (2018). *Pengantar keuangan publik*. Refika Aditama.

Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.

Blom, G. (1958). *Statistical estimates and transformed beta-variables*. John Wiley & Sons.

Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2016). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.

Burkhead, J., & Miner, J. (2017). *Public budgeting*. Routledge.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dunn, W. N. (2018). *Analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

Fahmi, I. (2020). *Metode penelitian kuantitatif untuk akuntansi dan keuangan*. Alfabeta.

Fauzan, S. (2020). *Budgetary slack pada anggaran sektor publik*. Guepedia.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Ed. 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2017). *Pengelolaan keuangan negara dan daerah*. UPP STIM YKPN.

Helmiwan, T., Yalisman, F., Utama, R., Prihartini, N. S., & Wicaksono, P. A. (2022). Penumpukan belanja di akhir tahun berdasarkan karakteristik belanja. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1).

Hermawan, A. (2019). *Analisis kebijakan publik*. Kencana.

Hidayat, R. (2020). *Akuntansi sektor publik kontemporer*. Mitra Wacana Media.

IMF. (2018). *Public financial management and its emerging architecture*. International Monetary Fund.

Liebman, J. B., & Mahoney, N. (2017). Do expiring budgets lead to wasteful year-end spending? *Public Budgeting & Finance*, 37(3), 1–27. https://doi.org/10.1111/pbaf.12158

Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Menifield, C. E. (2020). *The basics of public budgeting and financial management: A handbook for academics and practitioners* (4th ed.). Hamilton Books.

Moeheriono. (2017). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi*. RajaGrafindo Persada.

Mulyani, H. T. S. (2021). Analisis penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(1), 44–54.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.

Nugroho, R. (2020). *Public policy*. Elex Media Komputindo.

Pramudito, R. (2017). *Pengelolaan persediaan barang pemerintah*. Pustaka Pelajar.

Rubin, I. S. (2016). *The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing* (8th ed.). CQ Press.

Schick, A. (2017). *Budgeting for public managers*. Brookings Institution Press.

Sedarmayanti. (2018). *Good governance*. Mandar Maju.

Sembiring, M. (2017). *Metodologi penelitian keuangan publik*. Kencana.

Silalahi, E. E., & Aba, F. X. L. (2025). *Optimalisasi penyerapan anggaran melalui pengelolaan sumber daya manusia dan birokrasi*. Penerbit Nusa Cendana.

Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023). *Manajemen perbendaharaan negara*. PT Bumi Aksara.

Subarsono, A. (2020). *Perencanaan dan penganggaran sektor publik*. Graha Ilmu.

Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi faktor-faktor penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun (studi kasus Balai Penelitian dan Pengembangan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).

Suharno. (2018). *Perbendaharaan negara*. RajaGrafindo Persada.

Suharyadi, E., & Sulistiono, U. (2018). *Keuangan publik: Teori dan praktik di Indonesia*. Alfabeta.

Syahputri, R. D. (2025). *Fenomena lonjakan belanja barang dan jasa di akhir tahun: Perspektif gone theory*. Pustaka Ilmu.

World Bank. (2017). *Public financial management reform: Progress, challenges, and lessons*. World Bank.

Xi, Y., & Che, L. (2025). Fiscal buffering institution: How budget stabilization adjustment funds shape budget stability in China. *Finance Research Letters*, 85, Article 107996. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107996

Yalisman, F., & Khoirunurrofik, K. (2025). Risk aversion and budget uncertainty: Empirical evidence on year-end government spending spikes in Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 10(2), 115–130. https://doi.org/10.33105/itrev.v10i2.1227

Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(1), 35–48. https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56